



PENDATAAN KSJPS MINIMAL DUA TAHUN SEKALI

Pemegang KMS 2022 Tak Ada Perubahan

YOGYA (KR) - Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) pada tahun 2022 mendatang tidak akan mengalami perubahan atau sama dengan tahun ini. Hal tersebut karena Pemkot Yogya tahun ini tidak melakukan pendataan ulang Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

Merujuk Perwal 12/2020 terkait pedoman pendataan penduduk KSJPS, disebutkan dalam pasal 3 bahwa pendataan dapat dilakukan minimal dua tahun sekali kecuali untuk kondisi tertentu seperti bencana. "Kami memang tidak melakukan pendataan ulang untuk warga miskin pada tahun ini karena di dalam regulasi masih memungkinkan menggunakan data tahun sebelumnya," jelas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, Jumat (10/12).

Dinsosnakertrans Kota Yogya terakhir kali melakukan pendataan KSJPS ialah tahun 2020. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar kebijakan jaring pengaman sosial dalam bentuk KMS tahun 2021. Pemegang KMS tahun ini untuk kategori miskin dan rentan miskin berjumlah 15.584 kepala keluarga (KK) atau 48.269 jiwa.

Angka tersebut meningkat 8,53 persen dibandingkan dengan data 2020.

Oleh karena itu, karena tahun ini tidak dilakukan pendataan ulang KSJPS maka pemegang KMS tahun 2022 pun tidak akan mengalami perubahan. "Penerima KMS tahun depan maksimal sama dengan tahun ini. Bahkan bisa berkurang karena bisa jadi ada yang meninggal dunia atau pindah domisili. Yang pasti, tidak ada penambahan atau perubahan data," imbuh Maryustion.

Selain itu, jika di dalam keluarga KSJPS terdapat tambahan anggota keluarga seperti bayi yang baru lahir, maka anggota keluarga baru tersebut tidak dapat masuk dalam data KSJPS. Pada tahun depan pendataan

ulang KSJPS juga belum tentu akan dilakukan karena masih melihat kondisi serta hasil kajian.

Kendati demikian, Pemkot terus berupaya agar hasil pendataan KSJPS dapat terintegrasi seluruhnya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Se jauh ini jumlah DTKS selalu lebih besar dibanding hasil pendataan KSJPS. Namun demikian, baru 98 persen pemegang KMS yang masuk dalam DTKS.

"Sisanya dua persen itu masih terus kami usulkan agar bisa masuk ke DTKS. Ketika sudah satu data maka intervensi program pemberdayaan bisa lebih mudah dan tidak tumpang tindih," urainya. **(Dhi)-f**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005